

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah melakukan kajian yang mendalam melalui studi kepustakaan dan uraian dari bab-bab sebelumnya tentang alasan Inggris keluar dari Uni Eropa, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan mengenai studi kasus penulisan skripsi dalam studi Ilmu Hubungan Internasional.

Sebagai suatu negara yang berdaulat, Inggris mempunyai kepentingan nasional negaranya yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan pengambilan keputusan luar negerinya. Terkait dengan hubungan Inggris sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, hubungan keduanya tidak selalu berjalan dengan baik. Meskipun begitu, Inggris termasuk negara yang berperan aktif membangun Uni Eropa bersama sama dengan negara anggota lain. Walaupun Inggris banyak diuntungkan dari segi ekonomi, tercatat beberapa kali Inggris menyatakan keberatan terhadap kebijakan Uni Eropa karena dianggap terlalu memberikan kekuasaan bagi Uni Eropa dan juga merugikan Inggris. Inggris dipahami sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan nasionalnya. Semakin terintegrasinya Uni Eropa, segala hal terkait dengan ekonomi, politik, dan sosial negara anggotanya diatur oleh lembaga institusional Uni Eropa. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi Inggris untuk kehilangan kedaulatan negaranya untuk mengatur negaranya sendiri.

Latar belakang Inggris bergabung dengan Uni Eropa adalah karena kepentingan ekonomi. Mengingat Inggris bukan merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa walaupun sebenarnya Inggris telah diundang untuk ikut mendirikan. Inggris baru bergabung dengan Uni Eropa ketika European Community mulai menunjukkan keberhasilan ekonomi. Polemik keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa sebenarnya telah terjadi sejak dua tahun keanggotaannya di Uni Eropa. Referendum *Brexit* pertama diadakan pada tahun 1975 dengan presentase suara 67,2% rakyat Inggris memilih untuk tetap melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa. Akan tetapi hasil tersebut berbeda dengan referendum kedua yang dilaksanakan pada bulan Juni 2016 lalu dengan 51,9% suara untuk meninggalkan Uni Eropa.

Keputusan tersebut merupakan hasil dari 43 tahun keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Meskipun Inggris juga turut berperan aktif dalam berbagai kebijakan Uni Eropa terutama kebijakan ekonomi, akan tetapi sejak awal Inggris tidak setuju dengan integrasi yang terlalu dalam di bidang sosial atau politik. Sehingga meskipun tergabung dalam Uni Eropa, masing masing negara masih dapat menjalankan urusan dalam negeri masing masing negara. Sebagai anggota dari Uni Eropa, Inggris mendapatkan banyak keuntungan dari segi ekonomi. Terutama dampak dari tergabungnya Inggris dalam Single Market, ekspor import Inggris ke negara Uni Eropa memberi keuntungan sekitar 4-5% dari GDP Inggris pertahun. Inggris menjadi negara yang menguasai ekspor impor di Uni Eropa.

Menurut Pemikiran William D Coplin, dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri suatu negara akan mempertimbangkan pada 3 konsideran. Yaitu tuntutan politik dari dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer negara tersebut, dan lingkungan internasionalnya. Sebelum parlemen memutuskan untuk mengadakan referendium, gagasan referendium didorong oleh tuntutan dari partai *United Kingdom Independence Party*. Partai tersebut berperan sebagai *partisan influencer* dalam politik dalam negeri Inggris. Partai tersebut berkembang dengan isu menentang keanggotaan Inggris di Uni Eropa. UKIP mempengaruhi masyarakat dengan isu Brexit dan membawa isu tersebut ke parlemen. Sehingga partai ini dapat meraih 12,6% suara pada UK General Election tahun 2015 dengan peringkat ketiga. Setelah parlemen Inggris memutuskan untuk mengadakan referendium, kampanye Brexit datang dari organisasi kampanye “*Vote Leave*” yang merupakan organisasi kampanye resmi yang dibentuk pemerintah. *Vote Leave* membawa isu kedaulatan dan imigrasi yang selama ini menjadi pengganjal hubungan Inggris dengan Uni Eropa sehingga berhasil membawa rakyat Inggris dengan 51,9% suara rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa.

Selain tuntutan dari dalam negeri, keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa juga merupakan hasil dari hubungan Inggris dengan Uni Eropa yang sedang tidak harmonis sepuluh tahun belakangan. Beberapa kebijakan Uni Eropa seperti Kebijakan Mata Uang Tunggal dan Schengen Area tidak disetujui Inggris lalu memilih untuk “*option out*” dari kebijakan tersebut. Selain dua kebijakan tersebut, kebijakan Common Foreign and Security Policy juga dianggap merugikan Inggris

karena membatasi hubungan luar negeri Inggris dengan negara lain. Perdana Menteri David Cameron telah berusaha untuk menegosiasikan posisi keberatan Inggris terhadap kebijakan tersebut akan tetapi gagal. Sehingga jika dilihat dari kemampuan ekonomi dan militer Inggris, rakyat Inggris merasa mampu untuk memilih keputusan keluar dari Uni Eropa. Apa yang didapatkan Inggris dari Uni Eropa dianggap tidak sepadan dengan apa yang telah diberikan Inggris kepada Uni Eropa. Keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada referendum 2016 kemarin dianggap merupakan solusi untuk mempertahankan kedaulatan Inggris sebagai suatu negara yang merdeka dengan menjalankan fungsi institusi negaranya sendiri.

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mendapatkan pemahaman dan pembelajaran yang lebih mendalam tentang bagaimana sebuah kebijakan luar negeri merupakan hasil pertimbangan akan beberapa hal bukan semata-mata ada. Beberapa hal tersebut mencakup faktor dalam negeri dan hubungan luar negeri. Keputusan yang dipilih Inggris merupakan hasil dari pertimbangan tuntutan dalam negerinya, track record hubungannya dengan Uni Eropa, serta tak lupa juga melihat kemampuan negaranya sendiri untuk memilih langkah tersebut. Mengingat keputusan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, langkah Inggris memilih untuk keluar menunjukkan bukti komitmen Inggris atas kedaulatan nasional negaranya. Langkah ini akan menjadi kajian menarik dan memberikan kontribusi pada studi Ilmu Hubungan Internasional apabila dilihat dari kaca mata politik.